

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN DAERAH DI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Nabila Al Zahrah

NPP. 31.0376

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: nabilazahrah220@mail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Komedi, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(The financial management of Bekasi City focuses on the low regional own-source revenue (PAD) and dependence on transfer funds, influenced by regional retribution receipts and the management of separated assets. To enhance regional autonomy and improve public welfare, an analysis of regional revenue, including financial independence, financial dependence, revenue growth, and PAD potential, is essential as part of fiscal decentralization implementation. **Purpose:** This study aims to analyze regional revenue to understand the contribution of PAD in enhancing the financial independence of Bekasi City. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach, collecting primary data through interviews with BPKAD and Bapenda staff, and secondary data from the LRA of Bekasi City. Data analysis includes collection, reduction, presentation, and description of data with revenue ratio analysis. **Result:** The study shows that the financial independence level of Bekasi City averages 72% with a participative relationship pattern over the last five years. However, the financial dependence ratio averages 55.27%, categorized as very high dependence. Regional revenue growth reached 4.32% over the five-year period, despite annual fluctuations influenced by various factors. The analysis of PAD potential indicates that only a few types of taxes, such as restaurant tax and BPHTB tax, have prime potential in Bekasi City with proportions greater than one. **Conclusion:** Financial independence in Bekasi City has not yet been fully achieved due to high dependence on central government funds. However, Bekasi City has the potential to improve its financial independence by enhancing the effectiveness of regional own-source revenue. This will help increase financial independence and reduce reliance on the central government.*

Keywords: Revenue Ratio Analysis, Regional Independence, PAD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan keuangan Kota Bekasi berfokus pada rendahnya PAD dan ketergantungan pada dana transfer, dipengaruhi oleh penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan terpisah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan analisis pendapatan daerah yang mencakup kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan potensi PAD sebagai implementasi desentralisasi fiskal. **Tujuan :** menganalisis pendapatan daerah untuk memahami kontribusi PAD dalam meningkatkan kemandirian Kota Bekasi. **Metode :** Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pegawai BPKAD dan Bapenda, serta data sekunder dari LRA Kota Bekasi. Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan deskripsi data dengan analisis rasio pendapatan. **Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan tingkat kemandirian Kota Bekasi rata-rata 72% dengan pola hubungan partisipatif selama lima tahun terakhir, namun rasio ketergantungan keuangan daerah rata-rata 55,27% dengan kriteria ketergantungan sangat tinggi. Pertumbuhan Pendapatan Daerah juga mencapai 4,32% selama periode lima tahun, meskipun mengalami fluktuasi tahunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa hanya beberapa jenis pajak, seperti pajak restoran dan pajak BPHTB, yang memiliki potensi prima di Kota Bekasi dengan proporsi lebih dari satu. **Kesimpulan** Kemandirian di Kota Bekasi memang belum tercapai sepenuhnya karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi namun Kota Bekasi memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian keuangannya dengan memperbaiki efektivitas pendapatan asli daerah. Hal ini akan membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Kata kunci: Analisis Rasio Pendapatan, Kemandirian Daerah, PAD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi adalah suatu sistem tata kelola yang mengalihkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintahan dari tingkat pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat, serta memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Melalui implementasi kebijakan desentralisasi,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6) menyatakan perlunya pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah mengacu pada sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan dan wewenang yang signifikan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait urusan masyarakat. Pelaksanaan sistem otonomi harus mampu mengimbangi dengan meningkatnya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola daerahnya. Tanggung jawab tersebut termasuk dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, di mana pendapatan daerah dapat menentukan tingkat kemandirian suatu daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diberikan kepada daerah, yang juga dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Rinciannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 279, yang membahas mengenai hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah. Hubungan tersebut meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, serta pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif fiskal.

Pemberian kewenangan yang luas ini dapat menjadi hal baik bagi daerah, namun juga membawa beban berat yang memerlukan persiapan matang. Persiapan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya keuangan, serta peningkatan sarana dan prasarana di daerah tersebut. Aspek keuangan memiliki peran sentral sebagai indikator untuk menilai kemampuan riil suatu daerah, yaitu sejauh mana daerah tersebut mampu memanfaatkan sumber daya keuangannya sendiri untuk membiayai kebutuhan daerah tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2019:132), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari sejumlah sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kemandirian keuangan di Kota Bekasi. Penerimaan Pendapantan transfer yang lebih dominan dari pendapatan asli daerah adalah salah satunya. Berikut adalah tabel perbandingan antara dana transfer dan pendapatan asli daerah

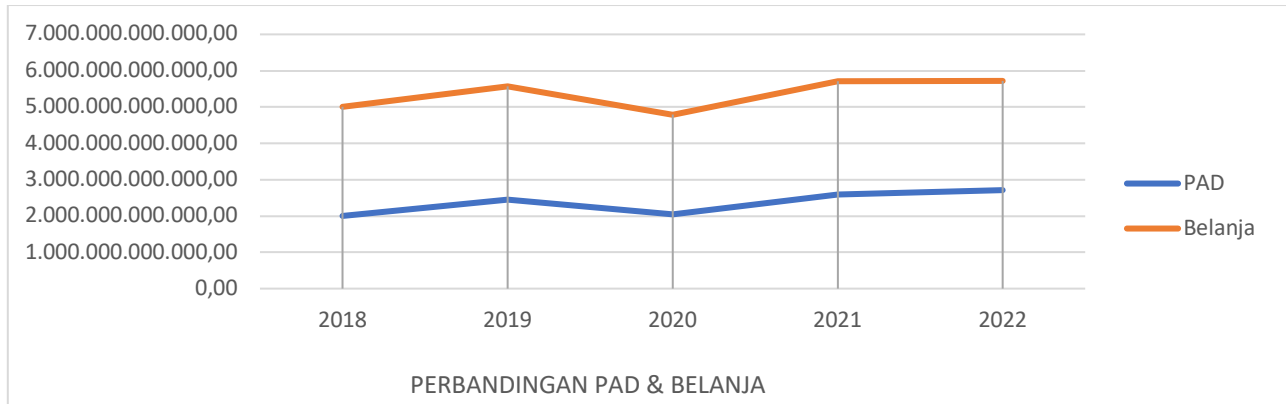
Tabel 1

Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer di Kota Bekasi

THN	PAD	%	DT	%	PAD+DT
2018	2.001.150.459.494,10	41,38	2.645.358.572.147	54,7	4.835.980.257.174
2019	2.442.151.873.746,89	40,95	3.521.780.918.762	59,05	5.963.932.792.508
2020	2.048.909.314.820,00	40,24	2.843.989.275.635	55,85	5.092.165.753.501
2021	2.536.707.290.387,00	43,98	2.982.121.832.529	52,39	5.685.691.671.008
2022	2.598.632.223.398	44,32	3.264.070.426.011	55,67	5.862.702.649.409

Sumber : <https://bpkad.bekasikota.go.id>

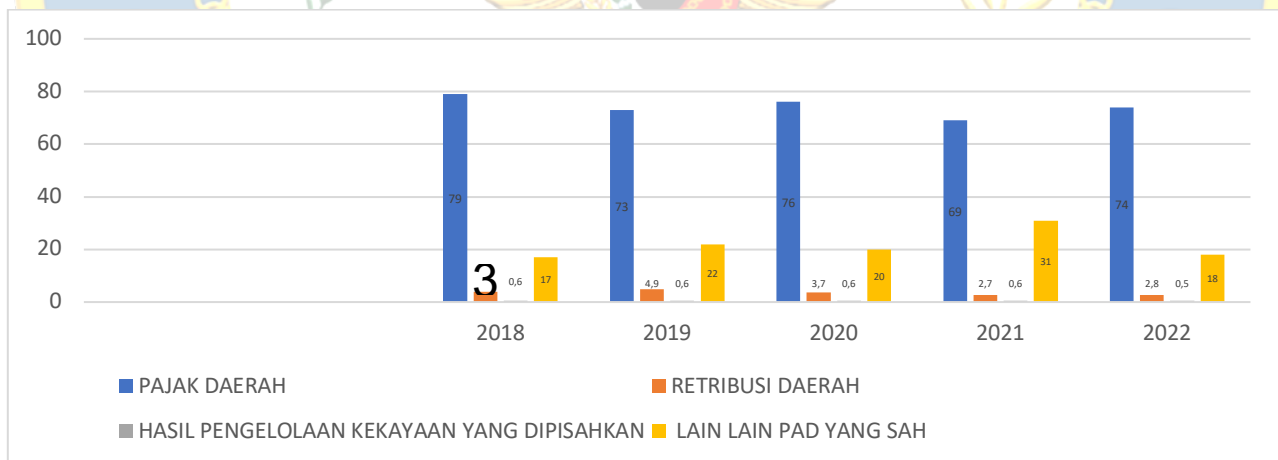
Berdasarkan tabel 1 pendapatan transfer merupakan penyumbang dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, total pendapatan yang mencakup PAD dan pendapatan transfer mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, total pendapatan menunjukkan kenaikan dimana tahun 2018 total pendapatan hanya 4.835.980.257.174 kemudian tahun 2019 pendapatan daerah naik menjadi 5.963.932.792.508 dengan persentase 18,91% Meskipun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan terhadap total pendapatan daerah namun dalam situasi ini pendapatan transfer masih melebihi pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiskal.



Gambar 1 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah & Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan gambar 1.2, peneliti menyajikan data perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Kota Bekasi. Kemandirian di Kota Bekasi masih belum tercapai, karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, sehingga belum mampu sepenuhnya membiayai belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan Kota Bekasi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Meskipun terdapat peningkatan dalam realisasi PAD dari tahun ke tahun, jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran belanja daerah. Ketidakcukupan PAD ini menyebabkan pemerintah daerah harus terus mengandalkan dana transfer untuk menutupi kekurangan dalam anggaran, yang pada akhirnya membatasi kemampuan Kota Bekasi untuk mencapai kemandirian fiskal yang sejati.



Gambar 2

Kontribusi Pajak Daerah,Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah

Sumber : <https://bpkad.bekasikota.go.id>

Dari gambar yang disajikan, terlihat bahwa penerimaan retribusi daerah belum optimal dan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan juga belum berjalan dengan baik terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan persentase retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 3,9 % pada tahun 2018 kemudian tahun 2021 retribusi daerah mengalami

penurunan yang sangat drastis dengan persentase 2,7% Pada tahun 2022 kenaikan terjadi lagi namun kenaikannya hanya sebesar 0,1% . Kemudian kontribusi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang perlu diperhatikan karena persentase hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah terhadap total PAD hanya sebesar 0,6 % selama tahun 2018 hingga tahun 2021 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,5%. Meskipun pendapatan dari pajak daerah terbilang tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 74,2%, tetapi hal tersebut belum mampu untuk membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendominasi total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian yang sama dilakukan oleh Hasdi Aimon dan Rova Putra (2015) yang meneliti analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten/kota dan berhubungan positif. setiap peningkatan yang terjadi pada pendapatan asli daerah maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dikabupaten/kota sumatera barat. Penelitian Arnaldi menghasilkan Tempat yang mampu memenuhi kebutuhan akan dana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan adalah letak tiang hubungan tingkat kemandirian Kota Padang (Arnaldi dkk,2019). Penelitian Ahmad Faiz Rustamaji terkait kinerja keuangan , kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Bekasi telah membaik dari tahun ke tahun (Rustamaji,2021). Penelitian Ar Rahamsyah Analisis PAD dapat memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan dana secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat (Rahamsyah,2021). Penelitian Rhena Maharani dari berbagai sumber,kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tengah adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD, yaitu sekitar 80% dari total PAD.Temuan ini menyoroti pentingnya pemungutan pajak daerah dan pengelolaan yang efektif atas sumber-sumber PAD yang sah lainnya dalam meningkatkan otonomi keuangan daerah dan mendorong pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah (Maharani,2022). Penelitian Risky Sandroyto Pangaribuan berkaitan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tobasa dengan hasil Bukti positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap manipulasi mata uang (IPM) dan Konvergensi kebijakan ekonomi dan pembangunan relatif terhadap tingkat kejahatan masyarakat umum (Pangaribuan,2022). Penelitian Fatiyah Dkk berkaitan Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah rasio tersebut derajat ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2016–2020 tergolong sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 63,60% artinya Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembiayaan pembangunan masih bergantung dengan Dana transfer dari Pusat. Sedangkan untuk derajat kemandirian Keuangan daerahnya juga tergolong sedang/Partisipatif dengan rata-rata rasio keseluruhan 57,13%(Fatiyah Dkk,2022). Penelitian Eko Diah Nurkhayati berkaitan Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Sukoharjo Hasil Penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh kemandirian keuangan daerah (Nurkhayati,2023). Penelitian R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung dkk,rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata – rata sebesar 74,17% dan rasio kemandirian tersebut konsisten berada diatas 60% disetiap tahunnya, sekalipun pada 2020 terdampak oleh Pandemi Covid19. Sedangkan untuk pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga 2021,

Pemerintah Kota Bandung hanya dua kali mengalami pertumbuhan keuangan yang negatif, yaitu pada 2017 serta pada tahun 2020 yang terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19 (Runjung,2022). Penelitian Sangquan Uchi A. A. Waromi dkk, kinerja badan pendapatan daerah kota jayapura dalam mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD), faktor-faktor yang mendukung dan menghambat secara internal maupun eksternal, dan upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah untuk mengatasi berbagai faktor yang menghambat(waromi,2022). Penelitian Fahriansyah Syam tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana masih rendah dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54% dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga masih rendah dengan rata-rata IPM yaitu 63,63% (Syam,2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dengan mengintroduksi salah satu dimensi yang unik dan belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung dan rekan-rekannya, hanya menggunakan Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan sebagai alat analisis utama. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menambahkan dimensi baru yang inovatif, yaitu Rasio Potensi Pendapatan Asli Daerah, yang belum pernah digunakan dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan analisis tetapi juga memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi kemandirian keuangan daerah dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan daerah untuk memahami kontribusi PAD dalam meningkatkan kemandirian Kota Bekasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dan menganalisis data menggunakan tiga tahapan khusus dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian yang membantu peneliti menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dan mengambil kesimpulan yang relevan. mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pegawai BPKAD dan Bapenda, serta data sekunder dari LRA Kota Bekasi.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Penganggaran, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi masing-masing 1 orang dan 2 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitian dan lokus. Berdasarkan dengan penelitian ini peneliti mengambil judul sesuai dengan permasalahan dan kesenjangan yang terjadi yaitu Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Peneliti menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian di Kota Bekasi menggunakan pendapat dari Mahmudi dengan menggunakan rasio pendapatan daerah dengan 4 dimensi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana suatu daerah bergantung pada sumber dana eksternal, seperti transfer dari pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman, dalam hal keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 2
Rasio Kemandirian

TAHUN (1)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (2)	PENDAPATAN TRANSFER (3)	KEMANDIRIAN % (4)	KATEGORI (5)
2018	2,001,150,459,494	2,645,358,572,147	75.64	Sedang
2019	2,442,151,873,746	3.329.109.212.222	73.44	Sedang
2020	2,048,909,314,820	2,843,989,275,635	72.02	Sedang
2021	2,536,707,290,387	3,021,521,560,171	83.95	Tinggi
2022	2,598,632,223,398	3,264,070,426,011	80,89	Tinggi
TOTAL	11,627,551,161,845	16,234,113,556,923	72	Sedang

Sumber: Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Saat ini, rasio kemandirian keuangan Kota Bekasi terletak pada kategori sedang hingga tinggi dengan presentase antara 51-75% dan 76-100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran yang dominan dalam pembiayaan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi mencapai angka 72,02% yang merupakan angka terendah dalam rentang waktu tersebut. Sementara itu, pada tahun 2022, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi hanya mencapai angka 80,89%.

3.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total pendapatan keseluruhan daerah tersebut. Rasio ketergantungan keuangan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah bergantung pada penerimaan dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah dalam perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} : \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH %	KRITERIA KETERGANTUNGAN
2018	2,645,358,572,147	4.835.980.257.174	54.70%	SANGAT TINGGI
2019	3.329.109.212.222	5.963.932.792.508	55,82%	SANGAT TINGGI
2020	2,843,989,275,635	5,092,165,753,501	60.37%	SANGAT TINGGI
2021	3,021,521,560,171	5,767,654,699,558	52.39%	SANGAT TINGGI
2022	3,264,070,426,011	5,862,702,649,409	55.68%	SANGAT TINGGI
TOTAL	11,774,939,833,964	29,373,196,465,328	55.27%	SANGAT TINGGI

Sumber: Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Menurut Halim (2004) kriteria ketergantungan terbagi menjadi 6 kategori yaitu persentase 0-10 artinya kriteria sangat rendah, persentase 10-20 artinya kriteria rendah, kemudian persentase 20-30 artinya kriteria cukup rendah selanjutnya persentase 30-40 artinya sedang. Apabila rasio ketergantungan >50% maka ketergantungan daerah tersebut sangat tinggi. Dari data tabel 4.11 perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Bekasi pada periode 2018-2022 tinggi, terindikasi oleh rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 55,27%. Hasil ini menggambarkan adanya ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan provinsi

3.3. Rasio Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja pendapatan daerah. (Mahmudi, 2019:91). Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut (Mahmudi, 2019:137):

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Th t : Tahun yang dihitung

Th (t - 1) : Tahun sebelumnya

Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2018 (dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	PERTUMBUHAN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.988.356.922.193	2.001.150.459.494	12.793.537.301,26	0,64 %
PENDAPATAN TRANSFER	2.578.875.060.833	2.645.358.572.147	66.483.511.314,00	2,40 %
TOTAL PERTUMBUHAN PENDAPATAN	4.756.703.208.559	4.646.509.031.641	-110.194.176.917,74	1,67 %

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Dalam tabel 4, terjadi beberapa perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer di Kota Bekasi. PAD mengalami kenaikan sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya, sementara Pendapatan Transfer naik 2,40%. Secara keseluruhan, terdapat pertumbuhan positif sebesar 1,67% pada total pendapatan. Semua perubahan ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar dapat berkontribusi lebih baik terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi

**Tabel 5
Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019 (dalam rupiah)**

URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	PERTUMBUHAN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.001.150.459.494	2.442.151.873.747	441.001.414.253	22,04%
PENDAPATAN TRANSFER	2.645.358.572.147	3.329.109.212.222	683.750.640.075	25,85%
TOTAL PERTUMBUHAN PENDAPATAN	4.646.509.031.641	5.771.261.085.969	1.124.752.054.328	24,21%

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Dari tabel 5, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer di Kota Bekasi mengalami pertumbuhan positif. PAD meningkat sebesar 22,04%, sementara Pendapatan Transfer naik sebesar 25,85%. Secara keseluruhan, Analisis Pertumbuhan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan positif dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar 24,21%. Ini

menandakan adanya perbaikan dalam penerimaan pendapatan daerah dan potensi yang lebih baik untuk pembangunan di Kota Bekasi.

Tabel 6.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020 (dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	PERTUMBUHAN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.645.358.572.147	2.048.909.314.820	(596.449.257.327)	-22,55%
PENDAPATAN TRANSFER	3.329.109.212.222	2.843.989.275.635	(485.119.936.587)	-14,57%
TOTAL PERTUMBUHAN PENDAPATAN	5.974.467.784.369	4.892.898.590.455	(1.081.569.193.914)	-18,10%

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Dari tabel 6, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer di Kota Bekasi mengalami pertumbuhan negatif. PAD mengalami penurunan sebesar -22,55%, sementara Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar -14,57%. Secara keseluruhan, Analisis Pertumbuhan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan negatif dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar -18,10%. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mengelola pendapatan daerah pada tahun tersebut. Upaya perbaikan dan strategi yang lebih efektif perlu diperhatikan untuk mengatasi situasi ini.

Tabel 7 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021 (dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PERTUMBUHAN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.048.909.314.820	2.536.707.290.387	487.797.975.567	23,81%
PENDAPATAN TRANSFER	2.843.989.275.635	3.021.521.560.171	177.532.284.536	6,24%
TOTAL PERTUMBUHAN PENDAPATAN	4.892.898.590.455	5.558.228.850.558	665.330.260.103	13,60%

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 7, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer di Kota Bekasi mengalami pertumbuhan positif. PAD tumbuh sebesar 23,81%, sementara Pendapatan Transfer tumbuh sebesar 6,24%. Secara keseluruhan, Analisis Pertumbuhan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 menunjukkan kenaikan positif dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar 13,60%.

Tabel 8**Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2022 (dalam rupiah)**

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PERTUMBUHAN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.536.707.290.387	2.598.632.223.398	61.924.933.011	2,44%
PENDAPATAN TRANSFER	3.021.521.560.171	3.264.070.426.011	242.548.865.840	8,03%
TOTAL PERTUMBUHAN PENDAPATAN	5.558.228.850.558	5.862.702.649.409	304.473.798.851	5,48%

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 8, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer di Kota Bekasi mengalami pertumbuhan positif. PAD tumbuh sebesar 2,44% sementara Pendapatan Transfer tumbuh sebesar 8,03%. Secara keseluruhan, Analisis Pertumbuhan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 menunjukkan kenaikan positif dengan Total Pertumbuhan Pendapatan sebesar 5,48%.

Tabel 9**Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)**

TAHUN	REALISASI ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI ANGGARAN TAHUN BERJALAN	PERTUMBUHAN (4)	% (5)
(1)	(2)	(3)		
2018	4.756.703.208.559	4.646.509.031.641	-110.194.176.918	-2,32%
2019	4.646.509.031.641	5.771.261.085.969	1.124.752.054.328	24,21%
2020	5.771.261.085.969	4.892.898.590.455	-878.362.495.514	-15,22%
2021	4.892.898.590.455	5.558.228.850.558	665.330.260.103	13,60%
2022	5.558.228.850.558	5.811.123.445.427	252.894.594.869	5,08%
TOTAL	25.625.600.767.182	26.680.021.004.050	1.054.420.236.868	4,32%

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Dari tabel perhitungan di atas, dapat dilihat dari Analisis Pertumbuhan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022 dikatakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 4,32%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu 24,21% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -15,22%.

3.4 Rasio Potensi Pendapatan Asli Daerah

Analisis potensi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi manajemen pemerintah daerah dan calon investor sebagai dasar pertimbangan terkait potensi peningkatan pendapatan yang masih dapat dijelajahi dan peluang keuntungan investasi. Analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk mengidentifikasi apakah jenis pajak dan retribusi daerah tertentu masuk dalam kategori potensial, prima, berkembang, atau terbelakang, menurut Mahmudi (2019:147). Setelah potensinya diketahui, langkah selanjutnya adalah mengambil kebijakan terkait jenis pajak atau retribusi yang dikategorikan sebagai potensial dan berkembang, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun rumusan menurut Mahmudi dalam menghitung analisis potensi pendapatan asli daerah sebagai berikut

$$\Delta Y_i = \frac{Y_i \text{ tahun } t - Y_i \text{, tahun } (t-1)}{Y_i \text{ tahun } t} \times 100\%$$

$$\Delta Y = \frac{Y_i \text{ tahun } t - Y_i \text{, tahun } (t-1)}{Y_i \text{ tahun } t} \times 100\%$$

$$\frac{\Delta Y_i}{Y} = \frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$$

1. Pajak Hotel

2018 =	$\frac{28.947.326.978,00 - 27.090.369.087}{28.947.326.978,00} \times 100\%$	= 6,41
2019 =	$\frac{33.213.910.502,00 - 28.947.326.978,00}{33.213.910.502,00} \times 100\%$	= 12,85
2020 =	$\frac{24.405.729.519,00 - 33.213.910.502,00}{24.405.729.519,00} \times 100\%$	= -36,09
2021 =	$\frac{29.265.480.174 - 24.405.729.519,00}{29.265.480.174} \times 100\%$	= 16,61
2022 =	$\frac{35.785.661.263,00 - 29.265.480.174}{35.785.661.263,00} \times 100\%$	= 18,22

Tabel 10 Pajak Hotel

TAHUN	PROPORSI	Yi	Yi
	PROPORSI	> 1	< 1
2018	$Y_i > 1$ $Y_i < 1$	0,165	0,005
2019		0,168	1,159
2020		0,141	(2,561)
2021		0,154	1,854
2022		0,160	1,214

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi

Berdasarkan analisis, dari tahun 2018 hingga 2019 terjadi peningkatan penerimaan pendapatan, namun pada tabel 10 menunjukkan tahun 2018 hanya memperoleh proporsi senilai 0,165 dan 0,005 dengan kategori terbelakang dan proporsi 2019 hanya 0,168 dan 1,159 menunjukkan kategori potensial. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 meskipun data dalam Tabel 10 menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, dari tahun 2021 hingga 2022, pajak hotel mulai meningkat. Kebijakan tersebut terbukti berhasil meningkatkan pendapatan pajak hotel, sehingga berdasarkan data tahun 2021 dan 2022, pajak hotel dapat dianggap sebagai pajak yang memiliki potensi.

2. Pajak Restoran

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{271.627.308.006,00 - 232.057.030.192,00}{271.627.308.006,00} \times 100\% = 14,46 \\
 2019 &= \frac{329.659.401.031 - 271.627.308.006,00}{329.659.401.031} \times 100\% = 17,60 \\
 2020 &= \frac{227.552.495.152 - 329.659.401.031}{227.552.495.152} \times 100\% = -44,87 \\
 2021 &= \frac{268.026.182.090 - 227.552.495.15}{268.026.182.090} \times 100\% = 15,10
 \end{aligned}$$

$$2022 = \frac{362.398.442.259 - 268.026.182.090}{362.398.442.259} \times 100\% = 26,04$$

Tabel 4. 11 Pajak Restoran

TAHUN	PROPORSI	Yi	Yi
	PROPORSI	> 1	< 1
2018		1,54	1,22
2019	Yi > 1	1,66	1,58
2020		1,31	-3,1
2021	Yi < 1	1,4	1,6
2022	ΔY	1,6	1,73

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat pajak restoran keadaan yang berubah-ubah dimana pada tahun 2018 sampai tahun 2019 pajak restoran sudah dapat dikategorikan prima namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga pajak restoran hanya mendapat kategori perkembangan. Meski demikian tahun 2021 dan tahun 2022 pajak restoran terus mengalami kenaikan sehingga pajak restoran dapat dikategorikan prima lagi.

3. Pajak Hiburan

$$2018 = \frac{42.379.454.424,00 - 50.306.468.316}{42.379.454.424,00} \times 100\% = -18,70$$

$$2019 = \frac{52.546.600.979,00 - 2.379.454.424,00}{52.546.600.979,00} \times 100\% = 19,35$$

$$2020 = \frac{24.495.228.842,00 - 52.546.600.979,00}{24.495.228.842,00} \times 100\% = -114,52$$

$$2021 = \frac{14.874.266.352,00 - 24.495.228.842,00}{14.874.266.352,00} \times 100\% = -64,68$$

$$2022 = \frac{44.073.469.267,00 - 14.874.266.352,00}{44.073.469.267,00} \times 100\% = 66,25$$

Tabel 12 Pajak Hiburan

TAHUN	PROPORSI		Yi	Yi	
	PROPORSI		> 1	< 1	
2018		Y_i > 1	0,241	-1,586	
2019			0,266	-4,610	
2020			0,142	(8,128)	
2021			Y_i ΔY	0,078	-7,442
2022			< 1	0,197	4,414

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 12 pajak hiburan terus mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Pada tahun 2018 dan 2019 pajak hiburan menyentuh angka negatif kemudian pada tahun 2020 jumlah proporsi jenis pajak/ jumlah pajak mengalami penurunan yang sangat dratis dengan angka -8,128 kemudian pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan namun tetap menyentuh angka negatif. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan memperoleh proporsi 0,197 dan 4,414 dengan kategori potensial.

4. Pajak Air Tanah

2018 =	$\frac{10.437.258.995 - 10.639.649.460}{10.437.258.995}$	X 100%	= -1,64
2019 =	$\frac{6.902.071.950 - 10.437.258.995}{6.902.071.950}$	X 100%	= -51,21
2020 =	$\frac{5.270.880.229 - 6.902.071.950}{5.270.880.229}$	X 100%	= -30,94
2021 =	$\frac{5.467.746.969 - 5.270.880.229}{5.467.746.969}$	X 100%	= 3,6
2022 =	$\frac{4.613.958.290 - 5.467.746.969}{4.613.958.290}$	X 100%	= -18,50

Tabel 13 Pajak Air Tanah

TAHUN	PROPORSI		Yi	Yi
	PROPORSI		> 1	< 1
2018			0,06	-0,13
2019		Yi > 1	0,03	-4,61
2020			0,03	(2,2)
2021		Yi < 1	0,03	0,4
2022		ΔY	0,02	-1,23

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi

Selama periode lima tahun, hanya pada tahun 2021 saja penerimaan pajak air tanah tidak mencapai nilai negatif, sementara pada tahun-tahun lainnya selalu menghasilkan nilai negatif. Hal ini sejalan dengan data yang tercantum dalam Tabel 13, di mana penerimaan nilai pajak air tanah pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022 juga hanya memperoleh nilai negatif. Pemungutan pajak air tanah di Kota Bekasi periode tahun 2018-2022 cenderung tidak stabil dan mengalami penurunan. Perubahan lokasi perizinan atas peralihan dan penetapan pajak air tanah dari kota ke provinsi sejak tahun 2018 serta dampak pandemi COVID-19 turut memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Pajak air tanah merupakan isu yang kompleks dan melibatkan banyak faktor.

9. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{451.281.670.772 - 444.913.068.974,00}{451.281.670.772} \times 100\% = 1,41 \\
 2019 &= \frac{398.880.214.273 - 451.281.670.772}{398.880.214.273} \times 100\% = -13,14 \\
 2020 &= \frac{397.277.765.036 - 398.880.214.273}{397.277.765.036} \times 100\% = -0,4 \\
 2021 &= \frac{500.616.607.838 - 397.277.765.036}{500.616.607.838} \times 100\% = 20,64 \\
 2022 &= \frac{612.164.939.538 - 500.616.607.838}{612.164.939.538} \times 100\% = 18,22
 \end{aligned}$$

Tabel 14
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

TAHUN	PROPORSI	
	PROPORSI	PROPORSI
	$Y_i > 1$	$Y_i < 1$
2018	2,57	0,11
2019	2,36	-1,18
2020	2,30	(0,02)
2021	2,63	2,3
2022	2,73	1,21

Sumber : Data diolah dari LRA Kota Bekasi

Berdasarkan hasil perhitungan selama lima tahun terakhir Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami keadaan fluktuatif dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan kemudian sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian menurut tabel 14 selama lima tahun hanya tahun 2019 pajak BPHTB mendapat kategori terbelakang. Pada tahun 2020 memang mengalami peningkatan namun jika dilihat berdasarkan perhitungan terjadi penurunan penerimaan hal ini terjadi akibat covid-19. Kemudian tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mendapatkan kategori prima. Maka dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan dilihat berdasarkan tahun 2021 dan 2022 hanya pajak restoran dan pajak BPHTB yang memiliki kategori prima sedangkan

kebanyakan pajak yang lain memiliki kategori terbelakang lalu pajak air tanah dan pajak hiburan adalah pajak yang memiliki kategori terbelakang sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 hal ini dikarenakan proporsi pajak air tanah dan pajak hiburan selalu kurang dari satu dengan demikian perlu upaya upaya untuk meningkatkan penerimaan mengingat potensi pajak di Kota Bekasi sangat besar.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 72 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki kemandirian keuangan yang sedang berdasarkan kriteria pola kemandirian keuangan daerah pola hubungan partisipatif. Kota Bekasi memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian keuangannya dengan memperbaiki efektivitas pendapatan asli daerah dan mempertahankan efisiensi belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Ramdhan Rahmansya (2021) dan Fathiyah (2022) yang hasil penelitiannya menyatakan kemandirian dengan rata-rata sedang dengan kriteria 50-75%.

Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bekasi pada periode 2018-2022, rata-rata sebesar 55,27% artinya ketergantungan daerah tersebut sangat tinggi. Sejalan dengan Penelitian oleh Zulkarnain menemukan bahwa tidak ada pemerintah daerah di Jawa Barat yang memiliki ketergantungan keuangan dalam kategori "RENDAH". Sebanyak 13 pemerintah daerah berada dalam kategori "SEDANG" dan 14 pemerintah daerah dalam kategori "TINGGI".

Pertumbuhan total pendapatan sebesar 4,32% selama periode lima tahun. Kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap kondisi ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi, memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan yang stabil. Peningkatan pada tahun 2021 dan stabilnya pertumbuhan pada tahun 2022 menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola ekonomi pasca COVID-19. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aldi Ramdhan Rahmansya (2021) mengindikasikan bahwa hasil analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi menunjukkan pertumbuhan positif dalam Pendapatan Asli Daerah.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi. Pertama, kurangnya kesadaran di kalangan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu. Kedua, ketidakpatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak yang mereka miliki. Selain itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terbilang rendah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Pemerintah Daerah telah mengambil beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi digitalisasi proses pemungutan pajak dan menjalin kerja sama dengan kejaksaan untuk mempercepat penagihan pajak yang tertunggak. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD juga sedang dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi menunjukkan tingkat kemandirian dengan rata-rata 72% selama lima tahun terakhir dan pola hubungan partisipatif. Artinya Kota Bekasi sudah berada tahap menuju mandiri namun hal ini berbanding terbalik dengan ketergantungan terhadap dana transfer. Berdasarkan perhitungan, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, dengan rata-rata 55,27% selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 40%-45% setiap tahun, menunjukkan langkah positif menuju kemandirian keuangan. Selanjutnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah mencapai 4,32% selama periode lima tahun, meskipun fluktuatif. Analisis Potensi PAD menunjukkan

hanya beberapa pajak, seperti pajak restoran dan BPHTB, yang memiliki potensi prima dengan proporsi lebih dari satu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian yang dilakukan hanya 10 hari kerja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bahan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Bekasi, sehingga memungkinkan ditemukannya wawasan yang lebih mendalam. Peneliti menyarankan agar studi lanjutan dilakukan di lokasi yang sama, terkait dengan kemandirian di Kota Bekasi, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Mengingat potensi yang dimiliki oleh Kota Bekasi, diharapkan kemandirian keuangannya dapat meningkat di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongpraajaan (IKAPTK) Kota Bekasi yang merupakan senior peneliti yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Mahmudi, R. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (3rd ed.). Penerbit Andi.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, 2014. Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Jurnal

Arnaldi and Irda Yushar. (2019). *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah*. Jurnal Pundi Vol 03.

Binang, Pranola. (2012). *Peran Faktor-Faktor Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Journal of accounting and investment.

Faridatussalam, Siti Retno. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya.

Fatimah Dkk. (2022). *Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi*. Jurnal Prajaiswa Volume 3 Number 1 Month June Year 2022.

Hasdi Aimon dan Rova Putra. (2015). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat*. Journal of accounting and investment.

Maharani, Rhena. (2023). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Manajemen Kreatif Jurnal.

Pangaribuan, R.S. (2020). *Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara Skripsi.

Rahamsya,Aldi Ramadhan. (2021).*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2020*.Universitas Siliwangi.

Runjung, R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma.) (2022) *Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik).

Rustamaji, A.F.(2022).*Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2019"*. Skripsi Stei.

Sumber Lainnya

(<https://bpkad.bekasikota.go.id>) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018-2022,Kamis 31 Agustus 2023

